

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan aspek penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Proses ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perkembangan ekonomi suatu negara dalam periode tertentu, serta sebagai indikator keberhasilan ekonomi di suatu wilayah. Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan produk nasional bruto (PNB), yang memerlukan kerjasama yang baik di antara berbagai sektor perekonomian (Maharani, 2016 dalam Raskina & Saharuddin, 2022).

Masalah pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya ketimpangan struktur tenaga kerja, dominasi sektor informal, serta distribusi investasi PMDN yang tidak merata, UMP yang relatif tinggi dan PAD yang rendah masih menjadi tantangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun Pulau Jawa unggul secara agregat, optimalisasi faktor-faktor ekonomi seperti tenaga kerja, investasi, upah, dan pendapatan daerah masih perlu dikaji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Teori ekonomi klasik muncul sebagai panduan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menekankan perlunya masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomian mereka, karena pendekatan ini lebih efisien dan tidak serumit intervensi pemerintah. Adam Smith (1776) juga menyatakan bahwa jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku melebihi tingkat subsisten, yaitu upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup.

Judul karya terkenal Adam Smith tentang teori pertumbuhan ekonomi adalah "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*," yang diterbitkan pada tahun 1776. Dalam teorinya, Adam Smith menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan populasi, akumulasi modal, dan produktivitas tenaga kerja (Lanza, 2012). Adam Smith berargumen bahwa penduduk yang bertambah akan memperluas pasar sehingga akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena dengan adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perkembangan teknologi (Sukirno, 2013 dalam Wahyuni et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan menciptakan kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah mencakup pemberian wewenang yang luas,

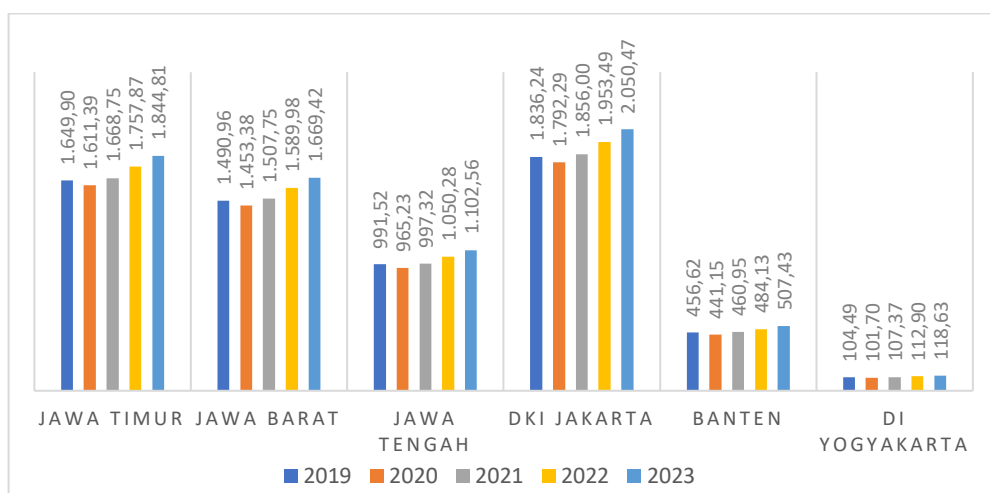
nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Pelimpahan tanggung jawab ini harus diiringi dengan pengaturan yang adil dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta penyeimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Al-Khawarizmi, 2021).

Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi di tingkat daerah juga mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Setiap provinsi di Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memenuhi target perencanaan ekonomi, serta mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang muncul, terutama dalam konteks otonomi daerah.

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. PDRB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga yang konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB menurut harga yang berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan (Nujum et al., 2020).

Pulau Jawa memiliki 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta. Pulau Jawa merupakan sentral dari pemerintah, sering didefinisikan sebagai pulau dengan kepadatan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dan sebagai pusat perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, PDRB Pulau Jawa menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi di antara provinsi-provinsi, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Secara keseluruhan, Pulau Jawa menyumbang sekitar 57,17% dari total PDB nasional, menjadikannya sebagai pusat ekonomi yang vital.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)

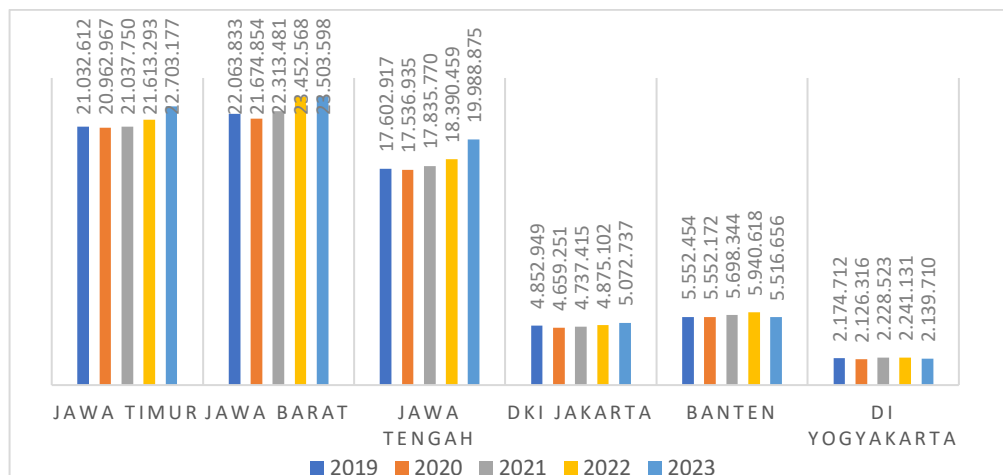
**Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)**

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa semua provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan PDRB secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di wilayah tersebut. Namun, tingkat pertumbuhan di setiap provinsi bervariasi. Provinsi dengan PDRB tertinggi

yaitu Provinsi DKI Jakarta secara konsisten memiliki PDRB tertinggi di Pulau Jawa sepanjang periode. Pada tahun 2023, PDRB DKI Jakarta mencapai 2.050 triliun rupiah, meningkat signifikan dari 1.836 triliun rupiah pada 2019. Hal ini menunjukkan peran besar DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. Kemudian Provinsi Jawa Timur mengikuti DKI Jakarta sebagai provinsi dengan PDRB tertinggi kedua. PDRB Jawa Timur pada 2023 mencapai 1.844 triliun rupiah, meningkat pesat dari 1.649 triliun rupiah pada 2019. Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten menunjukkan pertumbuhan PDRB yang signifikan dimana provinsi tersebut mencatat pertumbuhan PDRB yang stabil. Sedangkan Provinsi dengan PDRB terendah yaitu Provinsi DI Yogyakarta memiliki PDRB terkecil dibandingkan provinsi lain, meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan skala ekonominya yang lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, karena faktor geografis, populasi, dan dominasi sektor pariwisata dibandingkan sektor industri besar. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Pulau Jawa, dengan DKI Jakarta tetap sebagai pusat ekonomi utama. Namun, terdapat kesenjangan ekonomi antar provinsi yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pembangunan. Fenomena ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang untuk pemerataan pembangunan di masa depan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi PDRB diantaranya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu unsur produksi yang sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Tanpa tenaga kerja, sumber daya alam dan modal tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, tenaga kerja

didefinisikan sebagai penduduk yang berada dalam rentang usia kerja. Penduduk yang termasuk tenaga kerja yaitu bila penduduk tersebut sudah memasuki usia kerja. Batasan usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berusia 15-64 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)

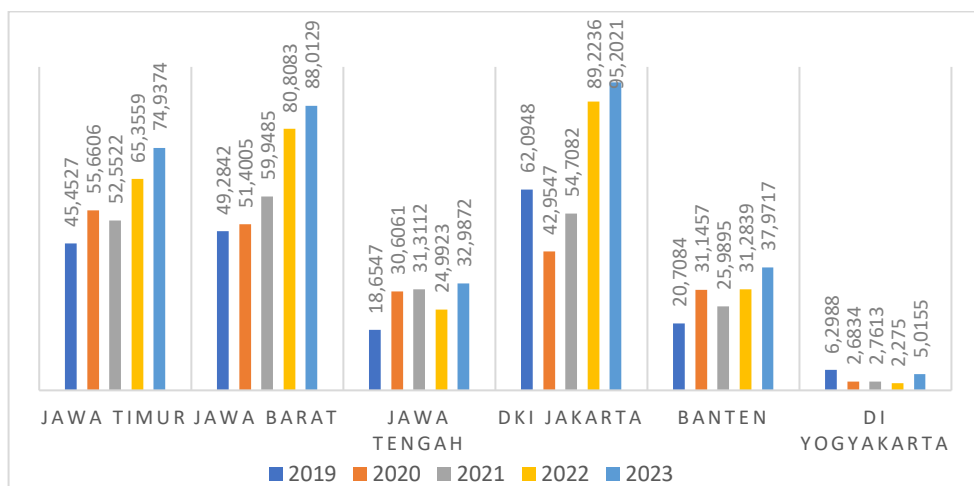
### Gambar 1.2 Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Jiwa)

Grafik 1.2 menunjukkan jumlah tenaga kerja di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023. Secara umum, terjadi fluktuasi jumlah tenaga kerja di masing-masing provinsi. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Jawa Timur sempat mengalami sedikit penurunan pada 2020, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 22,7 juta jiwa pada 2023. Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren serupa, dengan penurunan pada 2020 tetapi kemudian meningkat hingga 23,5 juta jiwa pada 2023. Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 17,5 juta jiwa pada 2020 menjadi hampir 20 juta jiwa pada 2023. Disisi lain Provinsi DKI Jakarta dan Banten mengalami pertumbuhan yang lebih stabil, dengan Provinsi Jakarta meningkat dari

4,6 juta jiwa pada 2020 menjadi 5 juta jiwa pada 2023, sementara Banten mengalami kenaikan hingga 2022 tetapi terjadi penurunan pada 2023. Sementara di Provinsi DI Yogyakarta memiliki jumlah tenaga kerja terendah dan mengalami sedikit penurunan pada 2023 setelah mengalami peningkatan pada 2021 dan 2022. Fluktuasi jumlah tenaga kerja ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pandemi COVID-19, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sangat bergantung pada ketersediaan kapital atau modal yang memadai. Modal ini berfungsi sebagai pendorong utama dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri, pertanian, hingga jasa. Salah satu sumber utama kapital yang dapat diandalkan adalah investasi yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN) di setiap provinsi di Pulau Jawa.

Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar untuk menarik investasi. Dengan populasi yang padat dan infrastruktur yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Investasi ini tidak hanya mencakup sektor industri besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah (UKM) yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)

**Gambar 1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)**

Pada gambar 1.3 terlihat bahwa tren investasi di berbagai provinsi mengalami fluktuasi dan peningkatan yang signifikan. Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam hal nilai investasi, dengan DKI Jakarta menjadi yang tertinggi pada tahun 2023 sebesar 95,2 triliun rupiah, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 88,01 triliun rupiah. Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang stabil, mencapai 74,94 triliun rupiah di tahun 2023.

Sementara itu, Jawa Tengah dan Banten mencatat angka yang lebih rendah dibandingkan tiga provinsi tersebut, meskipun tetap menunjukkan peningkatan investasi secara bertahap. Pada tahun 2023, Jawa Tengah mencapai 32,99 triliun rupiah, dan Banten mencatat 37,97 triliun rupiah. DI Yogyakarta memiliki angka investasi yang jauh lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya, dengan nilai tertinggi pada 2023 sebesar 5,1 triliun rupiah.

Kebijakan upah minimum merupakan aspek krusial dalam isu ketenagakerjaan global, baik di negara maju maupun berkembang. Tujuan utama dari kebijakan ini

adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup dasar bagi pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, penetapan upah minimum esensial untuk meningkatkan taraf hidup pekerja (Mudana & Purbadharmaja, 2024). Upah minimum berperan sebagai acuan terhadap tingkat daya beli masyarakat, yang secara langsung berdampak pada jumlah peredaran uang di masyarakat. Selain itu, upah minimum juga mempengaruhi produk domestik regional bruto (PDRB), karena peningkatan upah dapat mendorong konsumsi dan investasi, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, upah minimum yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya beli, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB.

**Tabel 1.1 Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023 (Rupiah)**

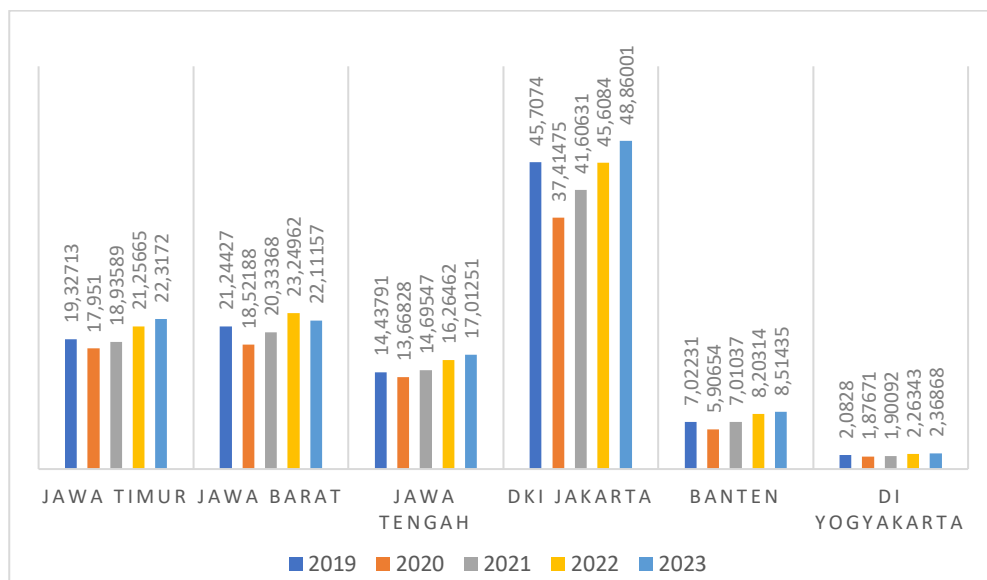
| Provinsi      | Tahun     |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Jawa Timur    | 1.630.059 | 1.768.777 | 1.868.777 | 1.891.567 | 2.040.244 |
| Jawa Barat    | 1.668.373 | 1.810.351 | 1.810.351 | 1.841.487 | 1.986.670 |
| Jawa Tengah   | 1.606.396 | 1.742.015 | 1.798.979 | 1.812.935 | 1.958.169 |
| DKI Jakarta   | 3.940.973 | 4.276.350 | 4.416.187 | 4.573.845 | 4.901.798 |
| Banten        | 2.267.990 | 2.460.997 | 2.460.996 | 2.501.203 | 2.661.280 |
| DI Yogyakarta | 1.570.923 | 1.704.608 | 1.765.000 | 1.840.916 | 1.981.782 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa data upah minimum provinsi (UMP) Pulau Jawa dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan di seluruh provinsi, mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang memengaruhi kebijakan pengupahan. Provinsi DKI Jakarta konsisten memiliki UMP tertinggi, melonjak dari Rp3.940.973 pada 2019 menjadi Rp4.901.798 pada 2023, yang mencerminkan tingginya biaya hidup di ibu kota. UMP serupa pada 2019 yaitu pada Provinsi Jawa Timur Rp1.630.059, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.668.373, dan Provinsi Jawa Tengah memiliki UMP sebesar Rp1.606.396. Sementara itu, Provinsi

DI Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari Rp1.570.923 pada 2019 menjadi Rp1.981.782 pada 2023, menegaskan peran ekonominya yang berkembang namun tetap moderat dibanding provinsi lain. Provinsi Banten juga mencatat kenaikan UMP yang signifikan dari Rp2.267.990 pada 2019 menjadi Rp2.661.280 pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan penyesuaian kebijakan yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, terutama di daerah industri dan urbanisasi tinggi di Pulau Jawa.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah maka pemerintah di setiap provinsi berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari nilai Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan (data diolah)

**Gambar 1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa  
Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam provinsi Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta, menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2019-2023. Secara umum, semua provinsi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, yang memukul aktivitas ekonomi, investasi, dan konsumsi domestik. Namun, setelah tahun tersebut, terjadi pemulihan dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda di setiap provinsi.

Pada Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan PAD yang konsisten, dari 19,3 triliun rupiah pada 2019 menjadi 22,3 triliun rupiah pada 2023. Setelah penurunan pada 2020 yaitu sebesar 17,9 triliun provinsi ini pulih dengan pertumbuhan yang stabil, mencerminkan ketahanan ekonomi lokal. Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren serupa, dengan PAD mencapai puncaknya pada 2022 yaitu 23,2 triliun rupiah sebelum sedikit menurun menjadi 22,1 triliun rupiah tahun 2023.

Fenomena stagnasi pada 2023 ini dapat menunjukkan tantangan dalam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah mencatat peningkatan moderat dari 13,7 triliun rupiah pada 2020 menjadi 17 triliun rupiah pada 2023. Namun, pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan provinsi lainnya, mungkin karena keterbatasan dalam diversifikasi ekonomi.

Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi, mencatat angka PAD tertinggi sepanjang periode. Setelah penurunan tajam pada 2020 yaitu 37,4 triliun rupiah akibat pandemi, PAD provinsi ini pulih dengan cepat, mencapai angka tertinggi pada 2023 sebesar 48,9 triliun rupiah. Ketergantungan pada sektor jasa dan bisnis

membuat Jakarta sangat rentan terhadap guncangan eksternal tetapi juga menunjukkan daya pemulihan yang luar biasa. Meskipun Provinsi Banten memiliki skala PAD lebih kecil, mengalami pertumbuhan signifikan setelah pandemi, dari 5,9 triliun rupiah pada 2020 menjadi 8,5 triliun rupiah pada 2023. DI Yogyakarta, sebagai provinsi dengan basis ekonomi pariwisata, menunjukkan pemulihan yang lebih lambat, dengan PAD meningkat dari 2 triliun rupiah pada 2019 menjadi 2,4 triliun rupiah pada 2023.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dampak besar pandemi pada perekonomian regional dan kapasitas pemulihan yang berbeda di setiap provinsi. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan pemulihan cepat, sementara Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tampaknya membutuhkan strategi diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kesenjangan PAD antar provinsi juga tetap terlihat jelas, dengan DKI Jakarta mendominasi sementara DI Yogyakarta mencatat angka PAD terendah. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama antarprovinsi untuk berbagi praktik terbaik dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Athilla & Aida (2020) menghasilkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laxa & Soelistyo (2020) menyatakan bahwa tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertasusila tahun 2014-2018.

Selain itu penelitian menurut Manihuruk et al., (2024) menyatakan bahwa PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Adi & Syahlina (2020) menunjukkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produk domestik regional bruto. Penelitian dari Aprilia et al., (2024) menghasilkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap upah minimum. Kemudian penelitian dari Saldi et al., (2021) memperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di daerah Kabupaten Kerinci. Sejalan dengan penelitian Ramadhani et al., (2024) menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD di Kalimantan Barat.

Berdasarkan data dan fenomena dari perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan serta mengkaji ulang variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa selama tahun 2015-2023. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap PDRB Serta Implikasinya Terhadap Upah Minimum Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah di Pulau Jawa Tahun 2015-2023"**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara parsial terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023?

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023?
3. Bagaimana implikasi PDRB terhadap upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah di Pulau Jawa tahun 2015-2023?
4. Bagaimana elastisitas PDRB terhadap tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri dan bagaimana elastisitas upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara parsial terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri secara bersama-sama terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
3. Untuk mengetahui implikasi PDRB terhadap upah minimum dan pendapatan asli daerah provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2023.
4. Untuk mengetahui elastisitas PDRB terhadap tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri dan mengetahui elastisitas upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah terhadap PDRB di Pulau Jawa tahun 2015-2023.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Kontribusi Ilmiah**

1. Penggunaan model regresi bertahap menjadi unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini, karena memposisikan PDRB sebagai variabel antara

(*intervening*) yang menghubungkan variabel eksogen (tenaga kerja dan PMDN) dengan variabel endogen (UMP dan PAD), dalam satu kerangka analisis empiris yang terstruktur.

2. Penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menggunakan data panel provinsi se-Pulau Jawa selama sembilan tahun dan metode *Fixed Effect Model* (FEM) serta *Random Effect Model* (REM) untuk menangkap efek individual daerah, yang sebelumnya belum banyak dikaji secara terpadu dalam satu studi.
3. Hasil dan temuan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan model perencanaan pembangunan daerah berbasis indikator ekonomi makro dan investasi domestik, serta membuka ruang eksplorasi untuk model-model ekonomi spasial dan struktural yang lebih kompleks.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana pengaruh variabel tenaga kerja, penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi, pendapatan asli daerah dan PDRB di Pulau Jawa.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama serta permasalahan yang sama, ataupun ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi para pembaca.

3. Bagi pemerintah, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan strategis terutama yang menyangkut PDRB di Pulau Jawa.

## 1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan lingkup Pulau yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta. Peneliti melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu publikasi laporan PDRB, tenaga kerja, penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi dan pendapatan asli daerah melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan dan jurnal-jurnal terkait.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan September 2024, diawali dengan pengajuan judul. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara interaktif, yang dilakukan oleh penulis bersama dosen pembimbing.

### Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

| No. | Keterangan                   | Tahun 2024 |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   | Tahun 2025 |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------|------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|------------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|--|--|--|--|--|--|
|     |                              | Sept       |   |   | Okt |   |   | Nov |   |   | Des |   |   | Jan        |   |   | Feb |   |   | Mar |   |   | April |   |   | Mei |   |   | Juni |   |   |  |  |  |  |  |  |
|     |                              | 3          | 4 | 1 | 2   | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4   | 1 | 2 | 3          | 4 | 1 | 2   | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4     | 1 | 2 | 3   | 4 | 1 | 2    | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | Pengajuan Judul              |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Penyusunan Usulan Penelitian |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.  | Seminar Usulan Penelitian    |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Revisi Usulan Penelitian     |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Analisis Data                |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 6.  | Penyusunan Skripsi           |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Sidang Skripsi               |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 8.  | Revisi Skripsi               |            |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |            |   |   |     |   |   |     |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |